

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Restrukturisasi pemangku adat dalam pemilihan ketua suku masyarakat Tengger merupakan sebuah langkah yang dapat diambil untuk memperkuat persatuan sosial dalam Komunitas Tengger.¹ Tengger adalah salah satu suku atau etnis yang tinggal di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Tradisi dan budaya Tengger memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat, dan pemilihan ketua suku adalah salah satu aspek yang dapat memengaruhi stabilitas dan persatuan sosial di dalam Komunitas Tengger.²

Namun, biasanya, selama proses reorganisasi pemilihan pemimpin adat atau ketua suku, masalah atau kesulitan yang mungkin muncul termasuk hal-hal ketidakjelasan kriteria pemilihan kriteria pemilihan dapat menimbulkan kebingungan dan memungkinkan berbagai interpretasi dari pihak-pihak yang terlibat. Ketidaksetaraan partisipasi beberapa anggota masyarakat Tengger mungkin merasa tidak diwakili atau tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Ini berpotensi menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan. Pengaruh eksternal ada kemungkinan intervensi atau pengaruh dari pihak eksternal yang dapat mempengaruhi proses pemilihan. Ini dapat berasal dari intervensi pemerintah, kelompok kepentingan eksternal, atau alasan lain yang dapat mengganggu kebebasan pemilihan. Ketidaktransparan proses pemilihan dapat menimbulkan keraguan

¹ Picard, M. (2020). *Kebalian: Konstruksi Dialogis Identitas Bali*. Kepustakaan Populer Gramedia.

² Rizqi, M. I. F., & Mujiwati, Y. (2023). Dinamika Kehidupan Budaya Masyarakat Suku Tengger dalam Harmoni Lintas Agama. *Pedagogy: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 10(1), 95-102.

dan ketidakpercayaan di antara masyarakat jika tidak transparan dan tidak terbuka. Sehingga Ketidaksetujuan dalam Masyarakat Tengger mungkin setuju atau tidak setuju tentang cara pemilihan dilakukan atau siapa yang dianggap layak memimpin. Karena ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan mempersulit upaya reorganisasi.

Tidak memahami proses pemilihan dan peran pemangku adat dapat menjadi hambatan. Pendidikan politik dapat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap proses restrukturisasi.

Pemilihan ketua suku yang diadakan dengan lebih adil, transparan, dan partisipatif dapat membantu mengukuhkan persatuan sosial dalam komunitas Tengger.³ Ini akan memastikan bahwa pemimpin suku yang terpilih memiliki dukungan yang lebih luas dan dapat bekerja untuk kepentingan bersama komunitas Tengger, mempromosikan harmoni dan kesejahteraan dalam Masyarakat Tengger.

Terpilihnya pemimpin Masyarakat Tengger merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan Masyarakat Tengger di Bromo. Suku Tengger merupakan suku bangsa yang memiliki budaya dan adat istiadat yang kaya dan unik.⁴ Terpilihnya pemimpin suku mempunyai dampak yang signifikan terhadap kohesi sosial dan kesejahteraan Masyarakat Tengger. Oleh karena itu, restrukturisasi proses pemilihan kepala suku patut dipertimbangkan.

Pada penelitian ini, peneliti membahas upaya restrukturisasi pemangku adat dalam pemilihan Ketua Suku Masyarakat Tengger sebagai sebuah langkah penting dalam memperkuat persatuan sosial

³ Priyowidodo, G. (2020). *Etnografi Komunikasi: Testimoni Empiris Spirit Keragaman pada Komunitas Akar Rumput-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

⁴ Yulianti, Y. (2011). *Perubahan ekologis dan strategi adaptasi masyarakat di wilayah Pegunungan Tengger*. Universitas Brawijaya Press.

di antara anggota Suku Tengger.⁵ Restrukturisasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara adil, transparan, dan inklusif, sehingga menghasilkan pemimpin yang mampu mewakili dan melayani kepentingan seluruh Masyarakat Tengger.⁶

Upaya restrukturisasi ini juga bertujuan untuk menjaga dan mempromosikan warisan budaya serta adat istiadat yang telah menjadi bagian integral dari identitas Suku Tengger.⁷ Sehingga peneliti membahas dari berbagai aspek penting restrukturisasi pemilihan Ketua Suku Masyarakat Tengger, termasuk keterlibatan masyarakat, transparansi dalam proses pemilihan, kualifikasi calon pemimpin, peran pemuda, kerjasama dengan pemerintah, pendidikan budaya, dan penyelesaian konflik. Semua upaya ini diharapkan dapat membantu memperkuat persatuan sosial di antara anggota suku Tengger dan menjaga keberlanjutan budaya mereka.⁸

Restrukturisasi adalah proses mengubah atau menata ulang suatu organisasi, perusahaan, atau unit bisnis dengan tujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan selaras dengan tujuan strategis yang lebih luas. Restrukturisasi mungkin melibatkan perubahan dalam struktur organisasi, strategi bisnis, operasi, kebijakan, atau kombinasi dari faktor-faktor ini.⁹

⁵ Picard, M. (2020). *Kebalian: Konstruksi Dialogis Identitas Bali*. Kepustakaan Populer Gramedia.

⁶ Quinn, M. (2019). *Penerimaan Pemilih Pemula Generasi Milenial Terhadap Simbol-Simbol Agama Dalam Iklan Kampanye Politik Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 Di Instagram* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

⁷ Ramadhan, I. (2021). *Sosiologi Etnik dan Ras*. Penerbit Lakeisha.

⁸ Kholis, A. (2017). *Ide dan wacana kebijakan publik*.

⁹ Angelica, I. (2020). *Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Tujuan restrukturisasi pembukuan adat dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan sekelompok komunitas tersebut. Di Indonesia, pemangku adat biasanya mengacu pada tokoh-tokoh atau pemimpin adat yang memegang peran penting dalam menjaga tradisi, adat istiadat, dan norma-norma budaya di dalam suatu suku atau komunitas adat. Proses struktur organisasi dapat mencakup dalam beberapa hal. *Pertama* dari peninjauan ulang peran dan tanggung jawab ialah restrukturisasi dimulai dengan meninjau ulang peran dan tanggung jawab pemangku adat. Ini melibatkan identifikasi peran utama mereka memainkan dalam mencegah tradisi masyarakat konflik internal atau mengatasi masalah sosial dalam komunitas. *Kedua* menyusun aturan dan prosedur ialah pembuatan atau penyusunan ulang aturan dan prosedur yang mengatur pemilihan, pemakaman, penyelesaian konflik, dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pemangku adat. *Ketiga* Partisipasi komunitas ialah memastikan bahwa proses restrukturisasi melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mayoritas. *Keempat* titik pelatihan dan Pengembangan ialah memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pemangku adat yang terpilih atau yang ada, untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan, pengetahuan budaya dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas mereka. *Kelima* transparansi dan akuntabilitas ialah mendorong transparansi dalam pengelolaan sumber daya atau dana yang terkait dengan pengakuan adat, serta memastikan ada mekanisme akuntabilitas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. *Keenam* pengakuan pemerintah ialah pengakuan pemerintah jika diperlukan ialah harus mendapatkan pengakuan atau dukungan resmi dari pemerintah atau lembaga-lembaga terkait untuk memastikan legalitas dan legitimasi pemangku ada. *Ketujuh* penyelesaian konflik internal ialah terdapat konflik internal dalam struktur pemangku adat, maka restrukturisasi

juga dapat melibatkan upaya penyelesaian konflik secara adil dan berkelanjutan.

Restrukturisasi pemangku adat dapat bervariasi dari satu komunitas ke komunitas lainnya tergantung pada kebutuhan, tradisi, dan dinamika lokal. Penting untuk memastikan bahwa proses restrukturisasi ini dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan komunitas adat yang bersangkutan.¹⁰

Dalam mekanisme pemilihan ketua pengangkutan ialah dapat dilakukan dengan cara berbagai hal yaitu dengan mekanisme adat tradisional dengan adanya banyak komunitas adalah memiliki mekanisme adat tradisional yang telah ada selama berabad-abad untuk memilih pemimpin adat, prosedur ini seringkali sangat terkait dengan nilai-nilai, adat istiadat, dan sistem kepercayaan lokal.¹¹ Pemilihan pimpinan adat dapat dipilih oleh dewan adat atau majelis adat yang terdiri dari pemangku adat yang lebih sepuh atau tokoh-tokoh adat yang dihormati. Sehingga mereka dapat menggunakan proses musyawarah atau diskusi mendalam untuk mencapai konsensus tentang siapa yang paling cocok menjadi ketua.¹²

Pemilihan suara rahasia biasa dilakukan dengan cara mengadakan pemungutan suara rahasia oleh anggota komunitas yang memiliki hak suara.¹³ Calon yang mendapatkan dukungan mayoritas suara akan terpilih menjadi ketua. Pemilihan langsung dalam beberapa kasus komunitas ada juga bisa mengadakan pemilihan

¹⁰ Hamali, A. Y. (2017). *Pemahaman Kewirausahaan*. Prenada Media.

¹¹ H Hermanto Suaib, M. M. (2017). *Suku Moi: nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat*. An1mage.

¹² Hartono, F. E. R. R. Y., & Lumbatobing, W. L. (2019). Konsep Jubata Menurut Suku Dayak Kanayatn, Suatu Tinjauan Pos-Strukturalisme. *Makasar: Tohar Media*.

¹³ AL HAROMA, A. I. (2017). Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 5(02).

ketua secara langsung, di mana calon yang bersaing dan memasuki pemilihan umum dan calon yang meraih suara terbanyak menjadi ketua dengan cara menunjukkan pemimpin adat yang lebih tua pemangku adat yang lebih dihormati dalam komunitas adat tertentu dapat memilih dan menunjuk calon ketua yang dianggap paling cocok untuk memimpin dedek dalam kombinasi metode ada beberapa komunitas ada dapat menggunakan kombinasi dari metode-metode di atas untuk memilih ketua umum kuadrat tergantung pada tradisi dan kebutuhan lokal mereka.¹⁴

Pentingnya untuk ingat bahwa setiap komunitas adat memiliki cara unik mereka sendiri dalam memilih ketua belum kuadrat, dan proses dapat sangat berbeda dari satu komunitas ke komunitas lain hal yang paling penting dalam menjalankan proses pemilihan dengan integritas, transparansi, dan partisipasi aktif dari anggota komunitas. Selain itu pemilihan harus diadakan sesuai dengan nilai-nilai adat dan hukum yang berlaku dalam komunitas adat tersebut.¹⁵

Pemilihan ketua suku dalam Masyarakat Tengger, yang merupakan salah satu kelompok etnis di Indonesia, mungkin akan mengikuti tradisi dan prosedur adat khusus yang telah berkembang di dalam komunitas mereka. Namun, peneliti tidak memiliki informasi spesifik tentang cara pemilihan ketua suku dalam masyarakat Tengger, karena proses ini sangat tergantung pada tradisi dan norma budaya yang ada di dalam Masyarakat Tengger itu sendiri.¹⁶

¹⁴ Febriyani, L. (2022). *Strategi Kandidat Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Karangrahayu Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi Tahun 2020)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam" 45" Bekasi).

¹⁵ Sadewo, F. S., & Legowo, M. (2016). Meneliti itu mudah.

¹⁶ Rahmaniah, A. (2015). *Etnografi Masyarakat Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pemilihan ketua suku dilakukan dalam masyarakat Tengger, peneliti perlu melakukan penelitian atau konsultasi langsung dengan anggota masyarakat Tengger atau pemangku adat dari komunitas tersebut. Biasanya, informasi tentang proses pemilihan, tata cara, dan kriteria yang digunakan untuk memilih ketua suku akan disediakan oleh orang-orang yang akrab dengan tradisi dan budaya Tengger.¹⁷

Penelitian ini menfokuskan dalam mengkaji restrukturisasi pemangku adat pada pemilihan ketua suku masyarakat Tengger karena dilatar belakngin oleh keunikan yang berbeda dari masyarakat atau suku lainnya. Selain dipimpin oleh kepala desa, masyarakat Tengger juga di pimppin oleh dukun adat. Tentu hal ini tidak banyak ditemui pada daerah lain. Secara adat, pemangku adat atau disebut dukun adat memiliki posisi yang diatas dari kepala desa, namun secara pemerintahan, dukun adat memiliki posisi di bawah kepala desa. Yang unik disini adalah kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilukada, maka pemangku adat di Suku Tenger dipilih melalui tahap tradisi masyarakat Tengger. Keberlangsungan proses pemilihan hingga kepemimpinan pemangku adat di Suku Tengger memiliki stratifikasi layaknya pemerintahan formal. Pemangku adat kemudian dibantu oleh *Legen* dan *Sepuh* yang posisinya berada di bawah dukun. Tugas dari masing-masing peran sosial tersebut diatur dalam suatu sistem adat yang mapan dan berlangsung secara turun temurun.¹⁸

Melihat dari pola masyarakat yang memegang teguh tradisi dan nilai budaya maka proses pengambilan data harus dilakukan

¹⁷ Romadi, U., & Warnaen, A. (2021). *SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN “Suatu Pendekatan Penyuluhan Pertanian Berbasis Modal Sosial Pada Masyarakat Suku Tengger”* (Vol. 1). Tohar Media.

¹⁸ John W Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. (London: Sage Publications, 1998).

dengan observasi maupun wawancara secara mendalam. Dengan observasi, peneliti dapat melihat atau mengamati secara langsung aktivitas masyarakat dan dukun adat terkait dengan tema penelitian serta suatu makna tersembunyi yang tidak diungkapkan dalam penelitian kuantitatif, sedangkan dengan wawancara mendalam, peneliti dapat secara langsung menggali data sedetail mungkin untuk memenuhi data dengan beberapa kali proses wawancara.

Pastikan untuk menghormati adat dan nilai-nilai masyarakat Tengger dalam proses penelitian atau interaksi Anda, karena masyarakat adat sering kali sangat menjaga tradisi dan identitas budayanya.¹⁹

Penataan kembali pemangku adat dan pemilihan ketua suku masyarakat tengger sebagai bentuk persatuan sosial adalah langkah yang penting untuk memperkuat dan memelihara hubungan harmonis dalam komunitas mereka ialah harus dapat mencapai tujuan konsultasi dengan pemangku adat dan tokoh masyarakat dengan cara yaitu melakukan konsultasi dengan waktu adat, para tokoh-tokoh masyarakat, dan anggota komunitas dan secara umum. Identifikasi calon ketua suku dapat mendengarkan pandangan dari pemangku adat dan komunitas identifikasi calon-calon potensial yang dianggap cocok untuk menjadi ketua suku. Proses seleksi terbuka biasanya diselenggarakan setelah proses seleksi terbuka untuk melibatkan partisipasi anggota komunitas.²⁰ Ini dapat berubah pemilihan umum musyawarah, atau metode lain yang dianggap sesuai dengan tradisi masyarakat tenggelam. Dalam kriteria penilaian tetapkan kriteria penilaian yang jelas untuk calon ketua suku, yang mencakup

¹⁹ Puspita, R. T. (2018). *PERSEPSI PENGUNJUNG TERHADAP PERSEMBAHAN BUDAYA DAN EVENT KESENIAN ART JOG TAHUN 2018 (Studi Kuantitatif Persepsi Pengunjung Masyarakat Jogja Terhadap Persembahan Budaya dan Event Kesenian Art Jog Tahun 2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta).

²⁰ Akhmad, N. (2020). *Ensiklopedia keragaman budaya*. Alprin.

pengetahuan tentang budaya dan Tradisi Tegal, keterampilan kepemimpinan integritas, dan komitmen untuk memajukan kepentingan komunitas.²¹

Pemeliharaan tradisi dan budaya dapat pemilihan ketua suku dan penataan kembali pemangku adat tidak hanya bertujuan untuk pembaruan struktural, akan tetapi untuk memelihara dan memajukan tradisi, budaya, dan nilai-nilai masyarakat dengan. Ini dapat dilakukan melalui pendukung terhadap upacara adat, festival, dan kegiatan-kegiatan budaya lainnya sehingga mekanisme dalam penyelesaian konflik ini dapat menyelesaikan yang efektif dan adil untuk mengatasi masalah internal yang mungkin muncul dalam Komunitas Tegal titik ini dapat membantu menjaga stabilitas dan harmoni di dalam komunitas tanggal keterlibatan pemerintah ialah bekerja sama dengan pemerintah atau instansi terkait yang bertugas dalam hal-hal terkait dengan masyarakat adat untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan resmi untuk pemilihan dan penataan kembali pengakuan.²²

Proses ini harus berlangsung dengan hormat terhadap tradisi dan budaya Masyarakat Tengger dan harus melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas dengan demikian pemilihan ketua suku dan penataan kembali pemangku adat dapat berkontribusi pada memperkuat persatuan sosial dan pemeliharaan identitas budaya yang khas dalam masyarakat Tengger.²³

²¹ Yudarti, E. (2019). *Implementasi Nilai-Nilai Islam Pada Budaya Lokal (Buharak, Ngumbai Lawok, Dan Siba Muli) Di Kabupaten Pesisir Barat* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

²² ANGGRAENI, R. N. *Rumah Adat Using Desa Kemiren Banyuwangi pada Tahun 1996-2019* (Doctoral dissertation, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan).

²³ Safa'at, R. (2013). *Rekonstruksi politik hukum pangan: dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan*. Universitas Brawijaya Press.

B. Identifikasi Masalah

Restrukturisasi pemangku adat pada kesatuan masyarakat ialah melibatkan beberapa upaya yakni dengan konteks tujuan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Pemangku adat adalah individu atau kelompok yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengatur tradisi adat serta hukum adat dalam masyarakat tertentu. Sehingga restrukturisasi pemangku adat biasanya bertujuan untuk memperbarui menguatkan atau mengubah peran dan fungsi mereka akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat modern. Dalam upaya restrukturisasi pemangku adat ialah dengan konsultasi dan berpartisipasi terhadap masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat dalam proses globalisasi adalah kunci utama. Membentuk badan atau lembaga adat yakni dengan lembaga adat yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengelola kelompok adat sehingga lembaga yang ada di tanggal ini dapat memiliki aturan dan prosedur yang lebih terstruktur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.²⁴

Pelatihan dan pendidikan kepada restrukturisasi yang mana memberikan pelatihan baru bagi masyarakat dan pendidikan terutamanya kepada pemangku adat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek-aspek hukum lingkungan serta sosial yang lebih relevan. Pemberdayaan perempuan dan pemuda di masyarakat Tengger ialah memastikan bahwa struktur organisasi juga memperhatikan pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam peran Adat sehingga dapat membantu menciptakan keberagaman dan inklusi dalam proses pengambilan keputusan adat. Penyusunan peraturan adat yang jelas yakni membutuhkan dalam penyusunan

²⁴ Aziz, D. (2018). Keberadaan Lembaga Adat Keujruen Blang Dalam Meningkatkan Produksi Padi Petani Manggeng Aceh Barat Daya. *Jurnal Geografi Gea*, 18(2), 114-129.

atau mengklarifikasi peraturan adat yang ada termasuk tugas tanggung jawab dan prosedur pengambilan keputusan hal ini dapat membantu menghindari konflik dan ketidakjelasan.²⁵ Dari beberapa upaya restrukturisasi pemangku adat ialah butuh setiap beberapa waktu dengan adanya evaluasi dan pengawasan agar dalam menyusun mekanisme evaluasi dan pengawasan untuk memantau perkembangan masyarakat Tengger dan hasil dari resultarisasi serta memungkinkan perbaikan yang diperlukan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Restrukturisasi pemilihan pemangku adat di Masyarakat Tengger ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penataan kembali pemilihan pemangku adat di Masyarakat Tengger.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk landasan berpikir dan perkembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan restrukturisasi pemangku adat tengger.²⁶ Secara umum penelitian ini memiliki manfaat utama yakni, dalam restrukturisasi pemangku adat pada pemilihan ketua suku masyarakat tengger.²⁷ Agar banyak orang luar sana tau seperti apa pemilihan ketua adat di kalangan masyarakat tengger terutamanya. Sehingga bagi masyarakat setempat tau dan bisa memahaminya dengan pergantian ketua suku tengger dengan cara yang seperti apa dan bagaimana.

²⁵ Adji Suratman, P. A. Buku Semester Ganjil 20-21" Analisis Lingkungan Bisnis dan Hukum.

²⁶ Indonesia, L. I. P. (2008). Masyarakat Indonesia. *Jakarta: LIPI, hlm*, 140-142.

²⁷ Ismayanti, Maya. "Dasar-Dasar Pariwisata Sebuah Pengantar." (2021).

Untuk itu dalam pemilihan ketua suku tengger ialah sebuah ilmu baru yang akan menjadi ilmu dan pengalaman baru bagi masyarakat tengger dan Indonesia. Penelitian ini juga menjadi sumber referensi penelitian dengan menggunakan studi kasus karena studi kasus menelaah suatu hal yang unik di daerah tertentu. Suku Tengger adalah salah satu suku yang memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Suku Tengger menempatkan pusat spiritual mereka di Gunung Bromo. Melalui wawancara mendalam serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan mewawancarai secara mendalam beberapa sumber yang berbeda yakni, beberapa masyarakat mengenai pendapatnya tentang dukun adat, dan juga data tentang kebudayaan yang sesuai dengan topik penelitian yang nantinya memberikan manfaat bagi pembaca.